

**LAPORAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2026
KECAMATAN BAYANG**



**KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2026**

KATA PENGANTAR

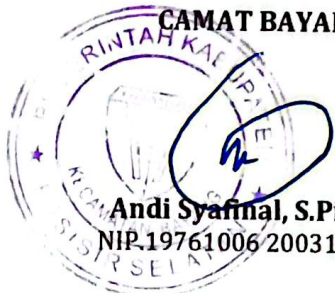
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat Rahmat dan Karunianya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2026 Kantor Camat Bayang ini dapat diselesaikan, yang merupakan gambaran dari kegiatan dalam satu Tahun Anggaran.

Rencana Kerja ini merupakan kinerja dari pada Pemerintahan Kecamatan Bayang yang dibuat bertujuan untuk memudahkan melaksanakan kegiatan oleh OPD maupun pihak yang berkepentingan

Dengan segala keterbatasan, penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026 ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari masing-masing bidang.

Kami menyadari bahwa Rencana Kinerja Tahun 2026 ini masih terdapat kekurangan dan belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk kesempurnaan Rencana Kinerja Tahun 2026 ini. Dan juga Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini, Semoga Allah SWT memberkahi kerja kita, amin YRA....

Pasar Baru, 05 Januari 2026

CAMAT BAYANG

Andi Syafinal, S.Pi, M.Si
NIP.197610062003121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKT Perangkat Daerah Kecamatan Bayang.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Kantor Camat Bayang.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	24
2.4. Reveuw Terhadap Rancangan Awal PD.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BAYANG	34
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bayang.....	37
3.3. Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	44
BAB V PENUTUP	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kabupaten Pesisir selatan	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayang	20
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Pesisir Selatan	27
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026	37
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kecamatan Bayang	42
Tabel 4.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Kecamatan Bayang	43
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bayang Tahun 2026	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan Dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan dalam Anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang - undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk periode tahunan, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 dan dilaksanakan melalui APBD tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Mengacu dari Permendagri No. 54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan di Kecamatan Bayang dalam rangka mencapai masyarakat Pesisir Selatan yang Sejahtera, yang menjadi Landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan RKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi renja tahun sebelumnya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Camat, Para kepala Seksi Kepala Sub bagian dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Kecamatan di luar Kecamatan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Untuk mencapai keberhasilan bidang tugas yang dilaksanakan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan sebagai langkah awal aktualisasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kerja Tahunan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang ada dengan melalui analisis SWOT dapat mencapai sasaran seperti yang di harapkan. Rencana Strategis merupakan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran sehingga kebijakan program dan kegiatan yang dibuat untuk menjawab dan mengatasi masalah yang timbul secara realitas, transparan dan kredibel untuk mengantisipasi perkembangan masa depan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kinerja Tahunan Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RKT Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dalam pedoman penyusunan dokumen RKT.

Dengan demikian sasaran penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 diharapkan dapat berperan dalam pengembangan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat

desa sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan untuk pencapaian target kinerja. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Tahun Anggaran 2026 mengacu pada Renstra 2025-2030, dengan memfokuskan pada tahapan program dan kegiatan ataupun kegiatan baru yang sesuai dengan Renstra 5 Tahunan tersebut.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 217);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Bayang Tahun 2026 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Bayang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 dan berpedoman pada Draft Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bayang Tahun 2025-2030. RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Kecamatan Bayang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Bayang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026. Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Bayang Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan Kecamatan Bayang dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Bayang dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

2. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Bayang tahun 2026.
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Bayang Tahun 2026.
4. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bayang Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Bayang Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bayang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bayang
- 2.3 Isu-isu Penting Pelayanan Tugas dan Fungsional Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayang

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bayang
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan perangkat Daerah

BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RKT PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKT Perangkat Daerah Kecamatan Bayang

Rencana Kerja Kecamatan Bayang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Bayang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan –kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RKT) Kecamatan Bayang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Bayang selama tahun 2025 dan tahun berjalan 2026 serta perkiraan target anggaran Tahun 2026. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan RKT Perangkat Daerah Kecamatan Bayang 2025 telah terlewati sampai Triwulan IV. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam RKT Tahun 2025 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan :

TIDAK ADA program/kegiatan yang tidak memenuhi keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/keluaran yang direncanakan :

No	Kegiatan	Faktor Pendukung Keberhasilan
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Pemkab, Mitra Desa, Kelompok Masyarakat, TKPK, PKH, dan institusi lainnya
3	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan Muspika
4	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
5	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kerjasama dan dukungan yang baik dari Desa dan Muspika
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang

		baik
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fungsi monev terhadap proses perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan dan pengelolaan target kinerja secara lebih tepat

Tabel 2.1

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan :

TIDAK ADA program/kegiatan yang melebihi memenuhi keluaran yang direncanakan

Dari uraian di atas diketahui sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 ada 5 (lima) kegiatan yang keluarannya mencapai target dan tidak ada kegiatan yang tidak mencapai target ataupun dengan keluaran yang melebihi target.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2026 dengan Rancangan Anggaran sebesar Rp. 2.936.494.994,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 2.899.155.994,- dan Belanja Modal sebesar Rp.37.339.000,- yang terurai terurai dalam 11 kegiatan dan 19 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 %.

4. Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target

Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2026, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Kecamatan Bayang sebagai berikut :

1. Ketebatasan Anggaran
2. Keterbatasan data dan informasi
3. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
5. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SKPD Kecamatan Bayang, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

SKPD Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra

Perangkat Daerah

Perubahan indikator kinerja dan target capaian program Renstra akan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi yang ada.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu diambil untuk Mengatasi Faktor Tersebut.

Pada faktor – faktor penyebab tersebut di atas maka SKPD Kecamatan Bayang melakukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil sebagai berikut :

- Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya.

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan dengan hasil evaluasi bahwa dari kegiatan pelaksanaan anggaran yang dirasakan masih adanya keterlambatan realisasi pertanggung jawaban keuangan, namun dalam pelaksanaan kegiatan relatif sesuai jadwal yang ditentukan pada tahun bersangkutan.

- Menganalisa data dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, belum memadainya kualitas sumber daya manusia. Dari sisi kuantitas sumber daya manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun dari sisi kualitas dilihat dari spesifikasi keilmuan dan pengetahuan masih sedikit SDM yang memadai untuk mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan secara lebih baik. Hal ini dilatar belakangi Pendidikan formal SDM yang berkualifikasi perencana sangat sedikit. Permasalahan lain yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, masih adanya program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program/kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran tidak memadai, sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik dan terarah.
- Mengambil kebijakan/tindakan untuk memperkecil resiko/akibat dari permasalahan yang ada.

Aspek kerugian negara diupayakan risikonya dapat diminimalisir. kebijakan/ tindakan untuk memperkecil resiko/ akibat dari permasalahan yang ada senantiasa dilakukan dengan mengikuti prosedur dan sistem sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian Terget tahun sebelumnya di gambarkan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026

Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah

: Kecamatan Bayang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun (n-3) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja perangkat Daerah Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.779.845.494	2.684.174.401	2.656.981.057	2.403.143.664	88%	2.656.981.057	6.468.390.555	
7 01 01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		0	10.986.020	0	4.985.000	99,98%	0	21.842.120	
7 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	0	0	4.986.020	4.985.000	4.985.000	0	21.842.120	
7 01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi triwulanan	0	0	0	0	0	0	0	
7 01 01	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.451.494.994	2.409.502.733	2.271.931.061	2.233.742.757	88,27%	2.271.931.061	6.997.482.886	

7	01	01	2.02	02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	2.370.494.994	2.327.414.104	2.454.522.134	2.164.782.757	2.164.782.757	2.327.414.104	6.736.323.247
7	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor ASN dan Non ASN yang dibayarkan	81.000.000	82.088.629	76.060.000	68.960.000	68.960.000	82.088.629	217.121.129
7	01	01	2.05	02	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		0	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat atau pelatihan	0	0	0	0	0	0	0
7	01	01	2.06	01	Administrasi Umum Perangkat Daerah		142.425.408	152.828.024	79.699.343	94.107.900	94.107.900	79.699.343	386.835.424
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	9.092.508	14.882.230	17.547.530	16.889.500	16.889.500	14.882.230	49.656.616
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	19.125.300	19.801.560	17.518.747	17.519.000	17.519.000	19.801.560	56.328.478
				05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	10.227.600	16.449.234	11.504.920	11.504.000	11.504.000	16.449.234	50.546.579
				06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	16.920.000
				08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	6.600.000	4.275.000	5.599.940	5.595.400	5.595.400	4.275.000	47.820.400

7	01	01	2.07	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	91.980.000	92.020.000	37.200.000	37.200.000	37.200.000	92.020.000	192.400.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		37.339.000	0	0	0	0	190.0964.370	0
				05	Pengadaan Mebel		5.162.000					92.735.700	
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		32.177.000					97.328.670	0
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		105.636.092	70.204.244	81.94%	35.547.007	86.184.283	147.680.743	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan Listrik (PLN) yang di bayarkan (KVA/bulan)	25.080.744	14.574.864	7.557.007	14.574.864	25.747.646		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor/jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	80.555.348	55.629.380	27.990.000	27.990.000	55.629.380	102.593.580	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		42.950.000	40.653.380	99.89%	34.761.000	29.100.000	109.047.880	
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional/jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	34.100.000	14.901.880	10.238.000	10.238.000	14.901.880	39.865.880	
				06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan Kantor/jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.850.000	11.600.000	4.400.000	4.400.000	11.600.000	41.998.000	

09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	0	14.151.500	20.123.840	20.123.840	14.151.500	46.308.840
7	01	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	91.082.000	0	33.950.000	0	96.010.000
7	01	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	91.082.000	0	90.560.500	0	96.010.000
7	01	02	01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	1.240.000	1.240.000	790.000	8.795.000
7	01	02	02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	0	0	0	0	0
7	01	02	03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	91.082.500	18.089.500	18.082.500	44.900.000	62.982.500
			Jumlah MTQ yang diikuti					
			Jumlah Lomba UKS yang diikuti & di bina		3.717.500	3.717.500	4.430.000	19.572.500
			Jumlah kegiatan PHBI yang diperingati		3.495.000	3.495.000	2.095.000	13.680.000
			Jumlah LDS yang difasilitasi & dibina		2.915.000	2.915.000	450.000	13.375.000

7	01	03						Jumlah Tracing Keluarga pasien Covid-19		6.000.000	61.110.500	61.110.500	6.000.000	67.110.500	
								Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	8.310.000	46.630.830	0	38.780.000	100%	0	145.633.330
7	01	03	2.01					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8.310.000	46.630.830	0	38.780.000	100%	0	145.633.330
				01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.860.000	14.945.330	12.516.150	12.516.000	12.516.000	14.945.330	41.883.830
								Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang kecamatan sesuai dengan prioritas							
				03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.450.000	31.685.500	26.265.000	26.264.000	26.264.000	31.685.500	103.749.500
								Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/dibina	0	0	0	0	0	0	0
								Jumlah produk unggulan yang dibina							
7	01	04	2.01					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	11.162.500	0	3.512.500	100%	0	25.225.000
								01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal lainnya	0	11.162.500	0	3.512.500	100%	0	25.225.000
7	01	05						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	45.457.000	23.940.000	0	33.411.500	99%	0	111.660.000
								Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	45.457.000	23.940.000	0	33.411.500	100%	0	111.660.000
7	01	05	2.01					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	45.457.000	16.242.500	29.061.500	29.061.500	29.061.500	16.242.500	83.165.000
				03				Jumlah pelaksanaan PHBN							
7	01	05	2.01					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	0	7.697.500	4.350.000	4.350.000	4.350.000	7.697.500	28.495.000
				08				Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan							

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing –masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut.

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bayang dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang telah tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029 dan Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Nilai Akip Kecamatan Bayang
2. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
3. Nilai kematangan inovasi kecamatan
4. Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik
5. Angka Kemiskinan Ekstrim
6. Prevalensi Stunting (EPPGM)
7. Persentase konflik yang diselesaikan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, OPD kecamatan bayang memberikan

Pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Kinerja Pelayanan di bidang Pemerintahan
 - a. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan dinas instansi terkait di tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten
 - b. Pelayanan legalisasi dan rekomendasi kepada masyarakat
 - c. Pelayanan teknis administrasi
 - d. Pelayanan kepada pemerintahan nagari dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan social kemasyarakatan
 - e. Peningkatan dan perwujudan ketentraman dan ketertiban
2. Kinerja Pelayanan di bidang Pembangunan
 - a. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi petanian, perikanan dan peternakan
 - b. Fasilitasi peningkatan produk unggulan nagari
 - c. Memfasilitasi musrenbang nagari dan melaksanakan musrenbang kecamatan
3. Kinerja Pelayanan Di bidang Kemasyarakatan
 - a. Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Keagamaan
 - b. Monitoring penyaluran jamkesmas dan jamkesda
 - c. Monitoring bantuan langsung tunai dari nagari Memfasilitasi pembangunan tempat tempat ibadah

Dibawah ini disampaikan table analisis pencapaian kinerja

Pelayanan dengan format table T.2.2 sbb

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bayang
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
1	Nilai AKIP Kecamatan Bayang	-	-	BB	BB	(BB) 74,0	(A) 80,6	BB	BB	(BB) 74,0	(A) 80,6	Realisasi 2022 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
2	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	-	-	85	85	85	86	85	85	85	86	Realisasi 2022 dan proyeksi 2024-2025 memakai angka target
3	Nilai kematangan inovasi kecamatan	-	-			75	80			75	80	

4	Persentase pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik					75%	80%	75%	80%								
5	Angka Kemiskinan Ekstrim					0%	0%	0%	0%								
6	Prevalensi Stunting (EPPGM)					4,50%	7,00%	4,50%	7,00%								
7	Persentase konflik yang diselesaikan					80%	82%	80%	82%								

Tabel analisis pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Bayang berdasarkan angka realisasi Bulan Juni tahun 2025 yang akan disajikan berikut ini :

No	OPD Pelaksana	Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target	Realisasi
1	KECAMATAN BAYANG	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	0	0
2	KECAMATAN BAYANG	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	48.862.660	22.236.000
3	KECAMATAN BAYANG	Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0
4	KECAMATAN BAYANG	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	41.798.000	0
5	KECAMATAN BAYANG	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.870.000	1.470.000

6	KECAMATAN BAYANG	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0
7	KECAMATAN BAYANG	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.390.985.986	1.089.706.956
8	KECAMATAN BAYANG	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0
9	KECAMATAN BAYANG	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.824.081	51.184.000
10	KECAMATAN BAYANG	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.055.119	9.704.006
11	KECAMATAN BAYANG	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.550.000	18.150.000

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bayang

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Bayang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Secara garis besar, kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh faktor eksternal dan faktor internal.

Berikut ini beberapa kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bayang Kab. Pesisir Selatan sebagai berikut.

a. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat (Partisipasi)

Salah satu pendekatan dalam perencanaan pembangunan adalah pendekatan partisipatif. Walaupun selama ini keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan telah dilakukan khususnya musrenbang namun keterlibatan tersebut masih bersifat elit, mengingat peserta musrenbang yang menghadiri secara umum para tokoh sehingga fungsi keterwakilan belum optimal. Selain itu, partisipasi masyarakat masih dalam tataran mengusulkan daftar keinginan belum beranjak pada daftar kebutuhan sehingga usulan tersebut belum dapat menyelesaikan masalah-masalah di tingkat bawah.

Di samping faktor eksternal, juga terdapat beberapa faktor internal yang juga berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan. Keberadaan sumber daya Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan:

1. Belum Memadainya Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Sumber Daya Manusia yang tersedia sudah cukup memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan, namun kalau dilihat dari segi kualitas berdasarkan spesifikasi keilmuan dan pengetahuan, SDM yang ada belum memadai untuk dapat mengerjakan fungsi perencanaan pembangunan dengan baik. Pendidikan formal Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi perencana masih sangat sedikit, demikian pula halnya yang bersertifikat (pendidikan non formal). Sehingga untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas masih sangat rendah, dengan ini diharapkan agar fungsi perencanaan pembangunan terlaksana dengan baik maka sekiranya dapat menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas secara memadai.
2. Keterbatasan Anggaran dan Pengelolaannya Belum Sepenuhnya Berbasis Kinerja.

Keterbatasan anggaran di beberapa program dan kegiatan menjadi salah satu kendala dalam merealisasikan capaian yang telah ditargetkan.

Permasalahan lainnya yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis kinerja. Masih ada program/kegiatan yang dilakukan belum jelas indikator capaiannya. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program – program dalam mencapai sasaran tidak memadai sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak terdistribusikan dengan baik.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kecamatan Bayang

Rancangan awal Renja 2026 SKPD Kecamatan Bayang sesuai dengan hasil analisis kebutuhan, tidak ada perubahan rumusan program dan kegiatan yang telah disusun. Proses perbandingan antara rancangan awal dengan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan untuk mengetahui sesuai/tidak sesuai, cocok/ketidakcocokan besarnya (anggaran/volume/satuan) terhadap program dan kegiatan yang sudah dirumuskan.

Berikut ini akan disajikan contoh perhitungan menggunakan rumus MPPC berikut:

12100: Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk 1 μ 1.000 barang ini

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Kabupaten Pesisir Selatan

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Bayang

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bayang			2.779.848.494	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Bayang			2.779.848.494
	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang			0	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang			0
	Pertumbuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	0	Pertumbuhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	6 Dokumen	0
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kecamatan Bayang			2.461.484.994	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kecamatan Bayang			2.461.484.994
	Pemeliharaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	2.370.484.994	Pemeliharaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	2.370.484.994

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	81 000 000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kecamatan Bayang	Jumlah dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	81 000 000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	0		0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang			
Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Bayang	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	3 org	0	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Bayang			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang	142.425.408		142.425.408	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Bayang			
Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah paket listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	9.082.508	Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Bayang			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	19.125.300	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Bayang			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bayang	Jumlah paket Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	10.227.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Bayang			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bayang	Jumlah dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Bayang			
Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	1 laporan	6.600.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kecamatan Bayang			

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	91.980.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	91.980.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	77 Unit	37.339.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	10 Unit	37.339.000
Pengadaan Mebel	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	18 Unit	5.162.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Unit	5.162.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	32.177.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	32.177.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	105.636.092	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 laporan	105.636.092
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	25.080.744	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	4 laporan	25.080.744
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Unit	80.555.348	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Unit	80.555.348
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Unit	42.950.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Unit	42.950.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Unit	34.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Unit	34.100.000

Lapangan	perizinannya	Lapangan	Lapangan	Lapangan	Lapangan	Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kecamatan Bayang	8.850.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Bayang	8.850.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Bayang	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Bayang	0
2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Kecamatan Bayang	91.082.500	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Bayang	91.082.500
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Kecamatan Bayang	91.082.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Bayang	91.082.500
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	Kecamatan Bayang	0	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Kecamatan Bayang	0
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kecamatan Bayang	91.082.500	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Bayang	91.082.500

3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bayang		8.310.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Bayang	8.310.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bayang		8.310.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Bayang	8.310.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bayang	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4.860.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Bayang	4.860.000	2 lembaga kemasyarakatan
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bayang	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	3.450.000	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Bayang	3.450.000	2 laporan
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bayang		0	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bayang	0	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bayang		0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Bayang	0	

	Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertical lainnya	Kecamatan bayang	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	1 laporan	0	Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi vertical lainnya	Kecamatan bayang	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah kecamatan	1 laporan	0
5.	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Kecamatan Bayang			45.457.000	Program Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Umum	Kecamatan Bayang			45.457.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Kecamatan Bayang			45.457.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah	Kecamatan Bayang			45.457.000
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan bayang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	1 kali	45.457.000	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan bayang	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	1 kali	45.457.000
	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan bayang	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 dokumen	0	Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Kecamatan bayang	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	1 dokumen	0
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang			11.800.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang			11.800.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang			11.800.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Bayang			11.800.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BAYANG

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana Kerja Kecamatan Bayang Tahun 2026 hakekatnya merupakan Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun propinsi.

3.1.1. Kebijakan Nasional

Kedudukan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Camat dan bertanggung jawab kepada BUPATI melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan visi Kabupaten Pesisir Selatan adalah ***"Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional"***.

Makna yang terkandung adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan professional demi menjadikan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat.

Profesional makna dari profesional adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik Antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Akuntabel Makna dari akuntabel adalah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*).

Adapun Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi, dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sector potensi dan unggulan daerah
4. Mewujudkan kabupaten pesisir selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

Memperhatikan visi dan misi tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat, agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya. Sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan selaku lembaga teknis daerah dan sebagai unsur penunjang pemerintah daerah, Arah kebijakan dalam rangka meningkatkan pelayanan infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk tahun 2026 diprioritaskan pada penyediaan pelayanan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui aksesibilitas terhadap infrastruktur, peningkatan pengelolaan pelayanan infrastruktur, dan peningkatan SDM dan Kelembagaan, yang akan dilakukan melalui :

- Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat.
- Penyediaan dan penambahan fasilitas transportasi.
- Meningkatkan profesionalisme dan kinerja kelembagaan.
- Percepatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang difokuskan pada pengembangan ekonomi serta mendukung pengembangan daerah pariwisata dan sentra-sentra produksi pangan dan pertanian.
- Pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi guna untuk kelancaran informasi.

3.1.2. Kebijakan Propinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur organisasi dan tata kerja mengacu pada redefinisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di kecamatan Bayang yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bayang

Dalam rangka mewujudkan Misi Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Bayang Tahun 2026, yaitu.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Th. 2026
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabilitas dan Berkinerja	Nilai LAKIP Kecamatan Bayang	100 % (A) 80
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%
		Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi	80
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Angka Kemiskinan Ekstrem	0%

		dan Pembinaan Pemerintahan Nagari	Prevalensi Stunting (EPPGM)	6,0%
			Persentase Pemerintahan Nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	85%
2.	Terciptanya kondisi masyarakat Pesisir Selatan yang aman, tentram dan dinamis	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase konflik yang diselesaikan	90%

3.3 Program Dan Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam Renja 2026 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025-2029 yang berfokus pada pencapaian visi dan misi Bupati Pesisir Selatan.

Rekapitulasi rencana program dan kegiatan tahun 2026:

Jumlah Program : 5 (Lima)

Jumlah Kegiatan : 9 (Sembilan)

Jumlah Sub Kegiatan : 19 (Sembilan Belas)

Pagu Indikatif APBD: Rp 2.936.494.994,- (*Dua Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh*)

Empat Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat rupiah).

Rencana Program dan Kegiatan yang menjadi prioritas Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program untuk menunjang pelaksanaan pelayanan perkantoran dilaksanakan dengan beberapa kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan tentang Anggaran Keuangan Kantor, dengan sub kegiatan yaitu :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Merupakan sub kegiatan khusus untuk pembayaran gaji pegawai negeri sipil di lingkungan kantor.

b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Merupakan sub kegiatan yang berisikan pembayaran honor pengelola keuangan kantor.

B. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan pelayanan dasar perkantoran yang terdiri dari beberapa sub kegiatan seperti :

a. Penyediaan komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan komponen listrik guna penerangan bangunan kantor seperti Belanja Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar dan battery kering).

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan Alat Tulis Kantor, Terdiri dari :

- Belanja Alat Tulis Kantor
- Belanja Materai dan benda pos lain nya

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi akan kebutuhan barang cetakan dan pengadaan kantor ,terdiri dari :

- Belanja Cetak
- Belanja pengadaan

d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bacaan pada kantor , Terdiri dari :

- Belanja surat kabar /majalah
- Belanja publikasi/pariwara

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tamu yang datang ke kantor camat yang terdiri dari :

- Belanja makanan dan minuman tamu

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan Operasional Untuk Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dan memenuhi kebutuhan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah serta rapat-rapat yang bersifat rutin yang diselenggarakan oleh kecamatan.

C. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan Pengadaan mebel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan sub kegiatannya seperti berikut :

a. Pengadaan Mebel

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan mebel umum kantor yang terdiri dari :

- Kursi eselon III
- Kursi eselon IV
- Kursi Rapat
- Meja ½ biro
- Meja Biro eselon III/b
- Meja karyawan pelaksana
- Lemari arsip pintu sliding kaca

b. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan mebel umum kantor yang terdiri dari :

- PC All In One
- Printer Warna
- Laptop intel core 13
- Proyektor dan Layar Proyektor
- Mixer 10 chanel
- Speaker aktif 10 inc
- Stand Mic
- Ac 1 pk

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan yang berisikan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor serta honorarium tenaga harian lepas dengan sub kegiatannya seperti berikut :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Merupakan sub kegiatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik untuk kantor. Kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik bermanfaat dalam penyediaan kebutuhan komunikasi, air dan listrik kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Merupakan sub kegiatan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa pelayanan umum kantor yang terdiri dari :

- Belanja Honorarium pegawai Honorer/tidak tetap
- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

E. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan kegiatan mengenai pemeliharaan barang milik daerah yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, kendaraan operasional, rumah dinas, kantor camat, peralatan dan mesin serta sarana dan prasarana kantor yang sub kegiatannya sebagai berikut :

**a. Pengetahuan dan Pemahaman, Keterampilan dan Sikap
Kendaraan Persewaan Motor dan Kendaraan Motor Listrik**

Menyebutkan dan menjelaskan konsep kendaraan perantara (motor) dan
jenis kendaraan beroda dua dan tiga roda serta perantara
perantara pada kendaraan motor listrik.

b. Pengetahuan Perawatan dan Mekanik Kendaraan

Menyebutkan dan menjelaskan konsep perawatan dan servis dan
manajemen (MTO) secara terpadu yang meliputi dan

- Menjelaskan dan merawat kendaraan (K) dan layanan dan proses
- Menjelaskan pengetahuan dan layanan kendaraan (K) dan layanan dan
proses.

Untuk memenuhi kriteria program dan kegiatan Kurikulum Berbasis
Kelembagaan Penerimaan Tahun 2021 dan Pendidikan Wajar Tahun 2022. Sesuai
dengan pasal 11.1.1 terdapat dan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bayang. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kecamatan Bayang kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kecamatan Bayang. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Bayang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berikut ini Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Kecamatan Bayang berdasarkan tabel T.4.1 di bawah ini :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LAKIP Kecamatan Bayang	(A) 80
2.	Meningkatnya Kaulitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
3.	Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan	80
4.	Meningkatnya	Angka Kemiskinan	0%

	Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Nagari	Ekstrem Prevelensi Stunting (EPPGM)	6,0%
		Persentase Pemerintahan nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik	85%
5.	Meningkatnya Ketentraman dan Stabilitas di Kecamatan	Persentase Konflik yang diselesaikan	90%

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026 sebagaimana tabel 4.2 berikut:

TABEL 4.2

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out come dan Kegiatan Output)	Data Pencapaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023		Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	20	21
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LAKIP Kecamatan Bayang		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase penugasan terkait pemerintah umum yang dilaksanakan			2.779.845.494	Kec. Bayang	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun		4 dok	0	Kec. Bayang	

[illegible]

				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	20 paket	19.125.300	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	10.227.600	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan bacaan dan Perundang-undangan yang disediakan	3 redaksi	5.400.000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan pelayanan tamu	12 buah	6.600.000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	12 dokumen	91.980.000	Kec. Bayang	
				Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			37.339.000	Kec. Bayang	
				Subkegiatan pengadaan mebel	Jumlah mebel	1 unit	5.162.000	Kec. Bayang	
				Subkegiatan Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	3 Unit	32.177.000	Kec. Bayang	

				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			105.636.092	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah tagihan Listrik (PLN) yang dibayarkan (KVA/bulan)	12 bulan	25.080.744	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantorkumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	6 orang	80.555.348	Kec. Bayang	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			42.850.000	Kec. Bayang	

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas OpeasionalJumlah kendaraan dinas yang dipelihara	2 unit	34.100.000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan KantorJumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	8.850.000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan lainnya yang dipelihara/ rehab	1 unit	0	Kec. Bayang	
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan		12.340.000	Kec. Bayang	
					Jumlah penetapan kawasan pedesaan yang di fasilitasi			Kec. Bayang	

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				11.800.000	Kec. Bayang
				Sub Kegiatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa Jumlah pengelolaan keuangan dan pemerintahan nagari yang baik	17 nagari		11.800.000	Kec. Bayang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan kecamatan			91.082.500	Kec. Bayang
				Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				91.082.500	Kec. Bayang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah permohonan non perizinan yang difasilitasi	10 Rekomendasi		0	Kec. Bayang
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah LDS yang difasilitasi	17 LDS		91.082.500	Kec. Bayang

Meningkatnya kualitas Inovasi Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Kecamatan				Jumlah MTQ yang diikuti	1 kali		Kec. Bayang	
					Jumlah UKS yang difasilitasi	5 UKS	0	Kec. Bayang	
					Jumlah Tracking Keluarga Pasien yang positif covid 19	80 Kali		Kec. Bayang	
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang menjadi prioritas kecamatan		8.310.000	Kec. Bayang	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan Pembinaan Pemerintah Nagari	- Angka Kemiskinan Ekstrim - Prevelensi Stunting (EPPGM) - Persentase Pemerintah an nagari yang memiliki administrasi dan kinerja baik				Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		8.310.000	Kec. Bayang	

Mewujudkan
Kondisi
Masyarakat
yang Aman,
tentram dan
Dinamis

Meningkatnya
Ketenrtaman
dan Stabilitas di
Kecamatan

Persentase
Konflik yang
diselesaikan

			Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan program kegiatan pada musrenbang nagari sesuai dengan prioritas		51 usulan	4.850.000	Kec. Bayang	
			Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah lembaga sosial ekonomi masyarakat yang difasilitasi/ dibina		17 lembaga	3.450.000	Kec. Bayang	
				Jumlah produk unggulan yang dibina		3 produk		Kec. Bayang	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				0	Kec. Bayang	
			Kegiatan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				0	Kec. Bayang	

				Sub Kegiatan Sinergitas dengan kepolisian RI, TNI dan Instansi Pertikal di wilayah kecamatan	Jumlah penyelesaian masalah trantibum yang difasilitasi	60 kasus	0	Kec. Bayang	
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penugasan terkait pemerintahn umum yang dilaksanakan		45.457.000	Kec. Bayang	
				Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			45.457.000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah pelaksanaan PHBN yang diselenggarakan dan diikuti	1 kali	45.457.000	Kec. Bayang	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan jumlah kunjungan ke nagari	147 Kali	0	Kec. Bayang	
JUMLAH							2.936.494.994		

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Bayang Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bayang Tahun 2025-2029 mengacu pada evaluasi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Kinerja (RKT) Kecamatan Bayang yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Bayang.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dalam rencana kinerja tahunan (RKT) 2026 ini, diperlukan dengan tekak dan semangat untuk mensukseskan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan dukungan dari semua pihak sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Bayang.

Dengan mengharap keridhoan Tahun Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu, **Menuju Masyarakat Pesisir Selatan Yang Sejahtera. Aamiin.**

CAMAT BAYANG

ANDI SYAPINAL, S.Pi, M.Si
NIP. 19761006 200312 1 003